

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam setiap perhelatan akbar pemilihan umum (pemilu) di dunia manapun selalu saja dijumpai sekelompok masyarakat yang tidak menentukan pilihannya alias golongan putih (golput), baik itu dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), maupun pemilihan presiden (pilpres).

Golput merupakan bentuk transformasi politik masyarakat yang kecewa terhadap sistem dan iklim politik dalam roda pemerintahan.<sup>1</sup> Golput juga bisa dimaknai sebagai Suatu yang secara sengaja tidak mau didaftarkan sebagai pemilih dan atau tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam perayaan pemilihan umum.

Kaitannya dengan hal diatas, bahwa setiap warga negara dan penduduk berhak untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya.<sup>2</sup> Hal ini juga didukung dengan peraturan yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak menggunakan Hak pilihnya pada prosesi Pemilihan Umum secara jujur dan adil. Setiap warga Negara yang pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilu telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wahid, KH.Abdurrahman+Halim HD.2009.*mengapa kami memilih golput*.Sagon.Jakarta hal 98

<sup>2</sup> UUD 1945 pada pasal 28

<sup>3</sup> Peraturan KPU nomor 12 tahun 2010 BAB I pasal 2 & 3

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Pemilih sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.<sup>4</sup>

Pemilihan umum 2014 di tanah air semakin berpotensi tak berkualitas, menyusul rendahnya kemauan masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Perilaku elit partai negeri yang tak mampu mengatasi masalah bangsa ini, menjadi penyebab utama apatisme masyarakat pemilih menggunakan hak demokrasi tersebut.<sup>5</sup>

Rendahannya kemauan masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sudah pada level sangat mengkhawatirkan. Potensi golput bisa melebihi 50 persen pada tahun 2014. Golput lebih dipilih daripada memilih partai politik atau pemimpin, sebab pada ujungnya parpol maupun pemimpin tidak bisa menepati janjinya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi bangsa. Sebagai contoh kecil; kita dapat lihat dari angka partisipasi politik masyarakat dalam pilkada Sumatra utara yang hanya mencapai 55% partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Peraturan KPU nomor 12 tahun 2010 BAB I pasal 4 ayat 1 & 2

<sup>5</sup> Pernyataan ketua DPD irman gusman dalam Forum Rektor Indonesia dikampus Surakarta, Jateng 10/05/2014 yang diambil dari <http://fri.or.id>

<sup>6</sup> Pernyataan Irman gusman yang diambil dari <http://www.suarakarya-online.com>

Berita dari pilkada yang diselenggarakan KPUD kota Malang tercatat jumlah angka golput pada masyarakat kota Malang pada pilwali 2013 ini mencapai 30% dari jumlah total pemilih.<sup>7</sup> Sedangkan data lain menunjukkan bahwa angka golput mencapai 34% dari jumlah daftar pemilih tetap yakni 612.569 pemilih dan yang datang menuju TPS sejumlah 399.025 pemilih.<sup>8</sup>

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Institute Pertanian Bogor (IPB) mengungkapkan bahwa dalam memilih calon walikota Bogor, ada sebesar 30,2% responden memilih belum tahu. Hal ini dikarenakan responden belum mengetahui calon walikotanya sehingga belum menentukan pilihannya. Selain itu, dalam menentukan pilihannya masyarakat kota Bogor juga melihat apakah calon walikota tersebut diusung oleh partai pilihannya atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat loyalitas masyarakat kota Bogor masih cukup tinggi terhadap partai politik.<sup>9</sup>

Sejalan dengan hal tersebut bahwa KPU mengutarakan kekhawatirannya terhadap angka golput pada pemilu 2014 mendatang. KPU menengarai, kalangan mahasiswa berpotensi menjadi pemicu golput yang berpengaruh signifikan ke masyarakat secara luas. Sebab mahasiswa lah yang selama ini paling getol meneriakkan golput.

Seperti yang pernah diutarakan oleh ketua KPU Indonesia :

*“saat ini, ada tren penurunan partisipasi masyarakat dari pemilu ke pemilu. Pemilu tahun 1999, tingkat partisipasi masyarakat masih cukup tinggi mencapai 93,30 persen, menurun menjadi 84,07*

---

<sup>7</sup> Laporan Kompas ATV Batu Malang tentang Kemenangan Aji dalam pilwali kota Malang pada hari Rabu, 29/05/2013 pukul 15.15 WIB

<sup>8</sup> Data diakses dari situs [www.memoarema.com](http://www.memoarema.com)>beranda>kotamalang pada Rabu, 29/05/2013 pukul 16.52 WIB

<sup>9</sup> Hermawan. 2008. *Analisis Preferensi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Calon Walikota 2009-2014*. (Skripsi) Institute Pertanian Bogor (IPB). Hal 7

*persen pada pemilu 2004 dan terus menurun menjadi 70,09 persen pada pemilu 2009”.*<sup>10</sup>

Menurunnya partisipasi masyarakat dalam prosesi Pemilihan Umum di tengarai dengan meningkatnya angka golput yang disuarakan oleh mahasiswa. Mahasiswa yang dalam hal ini memiliki peranan vital dalam perayaan pesta demokrasi merasa kurang dianggap oleh para pemangku kebijakan yang dalam hal ini adalah pemerintah. Alasan kekecewaan menjadi salah satu permasalahan yang terjadi. Sehingga angka golput menjadi sangat meningkat dari tahun ke tahun.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang memicu terjadinya angka golput selalu meningkat di masyarakat, terlebih pada tataran mahasiswa. Terbukti dalam pemilihan gubernur yang baru diselenggarakan oleh KPU Jawa Timur pada tanggal 29 agustus 2013 kemarin, tercatat ada sekitar 43% angka golput. Angka ini meningkat sekitar 6% dari pemilihan gubernur jatim yang dilakukan pada tahun 2008 yakni sekitar 28% pada putaran pertama, lalu 37% pada putaran kedua. Kemudian alasan mereka memilih untuk menjadi golput diantaranya karena : a), kuliah/kerja. b), tidak mengetahui jadwal pemilihan. c), bingung memilih siapa. d), tidak percaya terhadap calon dan partainya. e), tidak mendapatkan surat panggilan.<sup>11</sup>

Hal yang sama juga pernah diungkapkan oleh Prof. Dr. Imam Suprayogo yang saat itu masih menjabat sebagai rektor Uin Maliki Malang, beliau mengatakan bahwa tingginya angka golput pada setiap perhelatan pemilihan

---

<sup>10</sup> Pernyataan Husni Kamil Manik saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Haluoloe (Unhalu), Kendari, Sulteng, diakses dari [http:// www.google.com/news.detik.com](http://www.google.com/news.detik.com) pada senin, 18/2/2013

<sup>11</sup> Data diakses dari situs [www.pasuruhankab.go.id/berita.golput.jatim](http://www.pasuruhankab.go.id/berita.golput.jatim) pada haru rabu 4 september 2013 pukul 16:22 WIB

umum ditengarai juga oleh pemahaman politik mayoritas rakyat pemilih jatim yang semakin meningkat. Masyarakat luas yang selama ini disebut sebagai rakyat, wong cilik, dan semacamnya, dengan mata hati melihat apakah pilgub jatim ini memilih pejabat (gubernir dan wakil gubernur), merasa aneh, pejabat kok dipilih, ujanya. Menurutny, selama ini anggapan di tengah masyarakat, pejabat itu identik dengan sosok penguasa yang berbaju safari, setiap tahun membagi-bagi anggaran. Lalu jika yang tampak dimasyarakat seperti itu, muncul anggapan, buat apa repot-repot ikut pilgub dan sebagainya.<sup>12</sup>

Mengacu pada peranan mahasiswa dalam hal ini sangatlah diperlukan, karena salah satu peran mahasiswa dalam masyarakat adalah sebagai *agent of change* yakni pembawa perubahan dan juga sebagai *agent of control* yakni sebagai pengendali atau kontrol kebijakan pemerintah. Namun apa jadinya bila sang pembawa perubahan dan pengendali kebijakan tersebut bertolak belakang dengan peranan tersebut, dan justru menjadi pemicu terjadinya golput pada pemilu yang diselenggarakan. Akankah membawa dampak yang begitu besar terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Bagaimana perubahan yang akan terjadi? Masih layakkah mahasiswa disebut sebagai manusia yang memiliki kedua peran tersebut? Kemudian apa jadinya bila berjalannya demokrasi ini tanpa mahasiswa? Dan lain sebagainya.

Sesendapat dengan hal itu, pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ketua KPU Indonesia yang berbunyi:

“Saat ini di Indonesia terdapat sekitar 2.647 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan jumlah dosen sekitar 270.000 orang dan mahasiswa 4.273.000 kumpulan kaum intelektual dalam jumlah

---

<sup>12</sup> Data diakses dari jaringan pemilih dan pendukung calon presiden independen Indonesia yang ada di situs [www.suarapembaharuan.com/capresindy.blogspot.com](http://www.suarapembaharuan.com/capresindy.blogspot.com) pada tanggal 05 setember 2013

yang besar ini merupakan kekuatan yang maha dahsyat untuk melakukan perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat”.<sup>13</sup>

Namun melihat kondisi yang terjadi belakangan terakhir sangatlah bertolak belakang dengan inisiatif pemerintah untuk mengadakan pemilihan umum seperti yang tertera dalam peraturan yang telah disebutkan. Bahwa masih ditemukan adanya beberapa mahasiswa atau warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak menggunakan Hak Pilihnya (golput) dalam perayaan pesta demokrasi yang diselenggarakan. Fakta lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa adalah pemegang golput tertinggi dibandingkan elemen – elemen lain.

Mahasiswa mengatakan bahwa tidak memilih adalah sebuah pilihan.<sup>14</sup> Kondisi ini juga dibenarkan oleh salah satu mahasiswa pengurus organisasi intra kampus UIN Malang, ia mengatakan bahwa bukan cuma mereka saja (yang telah disebutkan diatas) yang merasakan hal yang sama terkait pemilihan umum yang diselenggarakan pemerintah, dan diperkirakan masih banyak lagi mahasiswa lainnya yang memilih untuk golput daripada ikut memilih dengan menggunakan hak pilihnya dalam setiap perayaan pemilu yang diselenggarakan.<sup>15</sup>

Fenomena ini sangatlah mengkhawatirkan, terlebih jika kita lihat dari pengalaman tahun 1999 sampai 2009, angka ketidak ikutsertaan masyarakat dalam perayaan pesta demokrasi atau golput tersebut semakin meningkat. hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan ketua KPU 2014.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Pernyataan Husni Kamil Manik saat memberikan kuliah umum di universitas haluoloe (unhalu), kendari, sulteng

<sup>14</sup> Wawancara hari sabtu tanggal 20/04/2013 pukul 14.00 WIB di bawah parkir perpus Pusat UIN malang

<sup>15</sup> Hasil tanya jawab pada pukul 21.00 WIB hari rabu tanggal 01 mei 2013 di organisasi X.

<sup>16</sup> Ibid 2&3

Kaitannya dengan golput bahwa fenomena golput (*non voter*) merupakan salah satu bagian dari kajian psikologis yang menjelaskan bahwa golput adalah aktifitas psikologis yang tak toleran, otoriter dan acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, dan sejenisnya cenderung perilaku politiknya abstain (golput). Sebab apa yang diperjuangkan oleh kandidat atau partai tidak selamanya sejalan dengan kepribadian tersebut. Pribadi-pribadi tak toleran cenderung menarik diri dari pentas politik. Maka perilaku apatis merupakan dari pribadi yang otoriter.<sup>17</sup>

Disisi lain Keberadaan partai politik (parpol) hampir selalu dapat dijumpai di setiap negara sebagai suatu kreasi dan manifestasi sistem politik modern atau menuju modernisasi sebagai respon untuk memperluas hak-hak pilih.<sup>18</sup> Parpol adalah sekelompok manusia yang mempunyai doktrin politik yang sama. Partai politik adalah pendapat yang diorganisasi.<sup>19</sup> Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>20</sup>

Adanya partai politik memang tak bisa terlepas dari unsur psikologis yang ada didalamnya. Seperti gaya kepemimpinan kader partai, moralitas dan etika partai, dan lain sebagainya. seperti yang dirilis oleh salah satu media akhir-akhir

---

<sup>17</sup> Mardatillah. 2010. *Factor-Factor Yang Mempengaruhi Munculnya Golput*. (Skripsi) Fakultas ilmu social dan politik, universitas Sumatra utara medan, halaman 21.

<sup>18</sup> Mahendra, yusril ihza. *dinamika tata Negara Indonesia*. jakarta. gema insani press. hal 204-205.

<sup>19</sup> slamet. 2005. *Hubungan Antara Religiusitas Dan Persepsi Terhadap Partai Islam Dengan Sikap Memilih Partai Islam*. (tesis) sekolah pascasarjana, universitas gajahmada Yogyakarta, hal: 18.

<sup>20</sup> Undang-undang RI nomor 2 pasal 1 tahun 2011 tentang partai politik

ini bahwa sekitar 59,1% responden menyatakan bahwa partai telah siap menghadapi pemilu 2014, Sedangkan yang menyatakan belum siap adalah 33,9%, 7,0% menyatakan tidak tahu. Sedangkan dalam polling yang dilakukan oleh lembaga yang sama terkait keyakinan masyarakat terhadap kondisi partai politik untuk menghasilkan pemimpin yang lebih baik menunjukkan bahwa 46,2% responden merasa yakin, 48,0% responden menyatakan belum yakin, sedangkan yang tidak tahu sebanyak 5,8%.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan bahwa peranan psikologi sangatlah vital dalam sebuah partai dalam pemilu.

Dari pemaparan diatas peneliti menemukan adanya kesenjangan psikologis yang terjadi pada Mahasiswa Psikologi UIN Malang khususnya dalam perayaan pemilu yang diselenggarakan. Kesenjangan tersebut Nampak pada harapan pemerintah melalui peraturan-peraturannya untuk mengadakan pemilihan umum berazaskan demokrasi, tercoreng dengan adanya mahasiswa yang lebih memilih untuk tidak menggunakan Hak pilihnya atau berperilaku golput. Sehingga hal ini akan cenderung mereduksi arti sebenarnya dari Pemilu yang dilaksanakan.

Dari kesenjangan tersebut, peneliti menengarai bahwa perilaku golput yang ada pada mahasiswa psikologi uin malang dipengaruhi oleh 4 hal, diantaranya; *pertama*, apatisme politik seperti; ketidakpercayaan terhadap pemerintah, *kedua*, sinisme politik seperti; perlawanan atau protes terhadap system, *ketiga*, alienasi seperti keterasingan dari pentas politik, dan *keempat*, anomie seperti kehilangan orientasi hidup karena politik. 4 aspek tersebut merupakan bagian terpenting dalam kajian perilaku golput atau *non voting behavior*.

---

<sup>21</sup> Lihat Koran kompas (departemen litbang) 5 mei 2013 halaman 2



Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang valid dan reliable serta untuk menguji asumsi peneliti, maka perlu diadakan penelitian psikologi mengenai perilaku golput yang ada pada mahasiswa psikologi uin malang. Dari fenomena inilah peneliti berusaha mencari penyebab terjadinya dan bagaimana kecendrungan golput yang ada pada mahasiswa psikologi UIN Malang dengan mengacu pada partai politik peserta pemilu menjelang Pemilihan Umum 2014.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) tanggal 25 maret 2013 yang dikeluarkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/kpts/KPU/tahun 2013 Penetapan Nomor Urut partai politik Pemilu tahun 2014 yang diantaranya : 1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem), 2. Partai Kebangkitan Bangsa(PKB), 3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), 5. Partai Golongan Karya (Golkar), 6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 7. Partai Demokrat, 8. Partai Amanat nasional (PAN), 9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 10. Partai hati Nurani Rakyat (HANURA), 11. Partai Bulan Bintang (PBB), dan 12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).<sup>22</sup>

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk mencoba melihat, mengetahui serta menguji tingkat kecendrungan perilaku golput yang terjadi secara lebih mendalam terhadap problematika perilaku golput yang ada di perjalanan demokrasi di Indonesia ini. Oleh karena itu, kaitannya dengan syarat mendapatkan predikat Sarjana (S1) penulis ingin mengangkat judul “Perilaku Golput Terhadap Partai Politik Peserta Pemilu 2014 (Studi Pada Mahasiswa Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”

---

<sup>22</sup> [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mencoba merumuskan permasalahan yang diantaranya :

1. Bagaimana kecendrungan perilaku golput yang terjadi pada Mahasiswa Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum 2014?
2. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan Kecendrungan Perilaku Golput Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum 2014?

## **C. TUJUAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kecendrungan perilaku golput pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap partai politik peserta pemilu dalam Pemilihan Umum 2014.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan kecendrungan perilaku golput mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap partai politik peserta pemilu dalam Pemilihan Umum 2014.

#### **D. MANFAAT**

Penelitian ini di samping memiliki tujuan-tujuan tertentu, juga mencakup dua manfaat utama, yaitu manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis: secara umum penelitian ini memberikan pengetahuan baru, serta melakukan pengujian dan pengembangan konsep dan teori ilmu pengetahuan psikologi dan politik. Sejalan dengan visi, misi dan tujuan luhur Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki semangat integrasi ilmu pengetahuan umum, maka diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap perkembangan keilmuan, khususnya Psikologi.
2. Manfaat praktis: secara khusus penelitian ini memberikan kontribusi praktis, terutama perkembangan psikologi politik yang ada di indonesia  
Manfaat ini tertuju kepada:
  - a. Peneliti: peneliti dapat menggunakan hasil penelitian untuk mengembangkan kajian-kajian keilmuan psikologi politik lainnya, khususnya dalam konteks perilaku golput.
  - b. Mahasiswa : dapat menjadi bahan referensi perilaku dalam menentukan arah pilihannya yang lebih baik terhadap peserta partai dalam pilpres 2014.
  - c. Pihak terkait : dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber motivasi dalam menjalankan kinerja instansi agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjalankan pemilu yang jujur, adil dan bertanggung jawab.